

Judul : Dana Desa belum capai aspek pemberdayaan  
Tanggal : Senin, 06 Maret 2017  
Surat Kabar : Suara Pembaruan  
Halaman : 16

## Dana Desa Belum Capai Aspek Pemberdayaan

[JAKARTA] Program Dana Desa yang dijalankan pemerintah sejak 2015, salah satu tujuannya adalah hilirisasi fiskal dalam rangka mengatasi ketimpangan pembangunan antardaerah. Hal ini mengingat aktivitas ekonomi masih cenderung terkonsentrasi secara geografis ke kawasan barat Indonesia.

Pembangunan ekonomi Indonesia memang bias ke barat, yang memegang pangsa sekitar 80% dari kegiatan ekonomi nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga triwulan IV-2015 menunjukkan, struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih didominasi kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57,9%, yang disusul Sumatera (22%), Kalimantan (9,1%), Sulawesi (5,6%), Bali dan Nusa Tenggara (2,9%), serta Maluku dan Papua (1,9%).

Guru Besar dan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Mudrajat Kuncoro, Minggu (5/3), mengatakan, salah satu intervensi pemerintah mengatasi kesenjangan itu adalah melalui Dana Desa.

Selain Dana Desa, yang tahun ini jumlahnya mencapai Rp 60 triliun, masih ada dana bagi hasil dan juga alokasi dana desa dari kabupaten ditambah dana dari 19 kementerian yang langsung masuk ke desa, yang totalnya bisa mencapai Rp 680 triliun.



Warga memperbaiki lantai jembatan gantung di Desa Rayeuk Pange, Kecamatan Pirak Timu, Aceh Utara, Provinsi Aceh, belum lama ini. Program Dana Desa cukup membantu penyediaan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat perdesaan.

FOTO ANTARA/RAHMAD

Aturan menyebutkan, 70% harus digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat, sisanya 30% diperbolehkan untuk membangun infrastruktur desa. Namun, yang terjadi saat ini, mayoritas digunakan untuk bangunan fisik, sementara program-program yang bertujuan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, cakupannya masih terlalu kecil. Penggunaan dana itu seharusnya lebih diprioritaskan untuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau tambahan modal kerja.

Di sisi lain, kata Mudrajad, persoalan di Indonesia saat ini korupsi menjadi problem utama di kelembagaan negara bahkan sampai ke tingkat desa. "Dana dikorupsi di semua level," ucapnya.

Senada dengan itu, pene-

liti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Hifdzil Alim mengingatkan, Dana Desa yang digelontorkan hingga kelak miliaran rupiah per desa itu bagai pisau bermata dua. Di satu sisi dana sebesar itu mampu menjangkau pembangunan hingga ke pelosok, namun juga berpotensi menyeret para kepala desa ke meja hijau. "Itu sudah terbukti. Tanpa pengawalan yang ketat, sudah banyak lurah yang diproses, bahkan ditangkap tangan Saber Pungli," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Gerindra, M Nizar Zahro mengungkapkan, anggaran Dana Desa setiap tahun meningkat. Tahun ini mencapai Rp 60 triliun, dan tahun berikutnya direncanakan sebesar Rp 120 triliun. Namun,

dengan anggaran yang demikian besar, berbagai persoalan masih menghantui pengelolaan dana desa.

Berbagai persoalan ini di antaranya masih maraknya penyimpangan. Dia menjelaskan, berdasarkan UU 4/2014 tentang Desa, Dana Desa adalah bagian tak terpisahkan dari dana untuk daerah. Dana transfer ke daerah, sebelumnya ada pos Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

"Kini ditambah lagi dengan Dana Desa, di mana anggarannya berada di Kementerian Keuangan, dan wajib ditransfer ke daerah melalui Pemerintah Daerah (Pemda) ke setiap desa, dengan hitungan tertentu yang disetujui rapat di Banggar DPR," jelasnya.

Dari dua tahun pelaksa-



naan Dana Desa, kata Nizar, pihaknya sudah melihat ada berbagai masalah akibat tak diantisipasi sejak awal. Permasalahan terutama dipicu tumpang tindih aturan dan belum meratanya kemampuan sumber daya manusia di tiap desa.

"Kadangkala pemerintah desa tak bisa ajukan APBDDes tepat waktu. Sebab SDM tidak mampu. Bahkan disinyalir APBDDes disusun lewat operator yang ditugasi di tingkat kecamatan," ujarnya.

DPR dan pemerintah memaklumi kondisi demikian karena SDM tiap desa, khususnya di luar Jawa, memang belum semumpuni yang ada di Jawa. Bahkan di beberapa daerah otonomi baru, kapasitas SDM desa masih sangat kurang.

### Penguatan Jejaring

Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto berpendapat, agar Dana Desa tepat sasaran, diperlukan tiga hal. *Pertama*, dukungan pengawasan dan evaluasi harus kuat dan berkelanjutan. *Kedua*, pendampingan melalui pendamping desa secara bertahap harus mengarah pada terjadinya alih pengetahuan tata kelola Dana Desa ke masyarakat. *Ketiga*, peran dan partisipasi masyarakat sangat penting membantu mengarahkan Dana Desa sesuai peruntukannya.

Selain itu, sebagai upaya mengatasi kelemahan aparat, menurutnya, bisa melalui penguatan kapasitas birokrasi desa, baik pelatihan dan magang lintas desa, dengan cara

belajar ke desa yang sudah maju dan bagus tata kelolanya. "Penguatan jejaring kelompok-kelompok masyarakat di desa harus dilakukan, baik Karang Taruna, kelompok-kelompok adat, sosial, keagamaan dan lain-lain. Ini untuk menjaga dan memastikan arah kebijakan birokrat desa," tambah Eko, Senin (6/3).

Ekonom Indef Didik J Rachbini juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional, tidak terlepas dari kemampuan daerah menciptakan peluang penggerak sektor riil yang produktif. Pemda yang sukses membenahi tata kelola ekonomi, terbukti mampu mendorong kinerja perekonomian lokal yang signifikan.

"Artinya, peran kepala daerah dalam memimpin juga turut memberikan daya dorong perekonomian. Pasalnya kepemimpinan tersebut akan mendorong para pejabat di level daerah untuk mau bergerak bekerja," ujar Didik.

Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjoe Kumolo menegaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) memberikan pembekalan kepada aparatur desa. Hal ini penting agar aparatur dapat menyusun perencanaan pembangunan desa secara maksimal.

"Sebagaimana perintah Bapak Presiden Jokowi kepada Mendagri, kami fokus pada peningkatan kualitas aparatur desa. Kemdagri terus melaksanakan penataan dan penataran kepada aparatur desa," kata Tjahjoe. [152/O-2/MJS/C-6]